

## Membangun Indonesia Dari Desa

**S**LOGAN yang selalu dikumandangkan Gubernur Gorontalo Drs. H. Rusli Habibie, MAP Membangun Gorontalo dari desa paling tidak mengandung 2 makna yaitu pertama pembangunan selama ini terlalu berorientasi ke kota sehingga dirasakan disparitas pembangunan antara desa dan kota semakin besar, kedua ajakan ini mengandung makna bahwa ketangguhan suatu bangsa adalah adanya sinergitas pembangunan antara desa dan kota. Saat ini tingkat urbanisasi sangat tinggi karena di kota banyak peluang pekerjaan serta pelayanan publik yang lebih banyak tersedia sehingga telah menggeser komposisi penduduk yang tinggal di perkotaan dan pedesaan ke arah semakin bertambahnya penduduk yang tinggal di perkotaan. Data publikasi statistik tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah penduduk pedesaan sebesar 119.321.070 jiwa atau 50,21 % dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Dari data tersebut rupanya ada gejala penyebaran penduduk lebih banyak mengalir ke perkotaan daripada hidup di pedesaan. Wilayah pedesaan di dunia ketiga biasanya dideskripsikan sebagai tempat bagi orang-orang untuk bekerja di sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Sementara itu dalam pengertian yang sempit, desa adalah suatu masyarakat para petani, nelayan, peternak yang mencukupi hidup sendiri (swasembada) (Boeke dalam yustika, 2007). Dengan gambaran tersebut adalah

benar jika sebagian besar penduduk desa merupakan kelompok masyarakat miskin padahal desa merupakan basis produksi. Dalam menghadapi persaingan global utamanya setelah diberlakukannya perdagangan bebas pada era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) bulan Desember 2015, maka ketahanan ekonomi kita harus berbasis pembangunan pedesaan. Pertimbangannya adalah karena selain potensi ekonomi kita banyak yang belum tergarap dengan baik di pedesaan juga karena sebagian besar penduduk kita tinggalnya di pedesaan. Pertanyaannya apakah desa sudah siap terutama sumberdaya manusianya untuk menerima program pembangunan yang dibawa ke pedesaan?. Sebetulnya kesadaran perlunya membangun desa sudah dimulai sejak tahun 1950 an melalui program modernisasi desa, tahun 1960 an melalui program yang dikenal dengan revolusi hijau antara lain dengan penyuluhan pertanian intensif, transfer teknologi, tahun 1970 an melalui program pembangunan pertanian yang terintegrasi dengan kredit yang distimulus oleh negara dan lanjutan dari revolusi hijau, tahun 1980 an melalui program kredit mikro, serta memaksimalkan peran NGOs, program ketahanan pangan, jaring pengaman pedesaan, aktualisasi peran gender, tahun 1990 an penyaluran kredit mikro dan sustainable development yang

Oleh:  
**Fachrudin Zain Olilingo**

ramah lingkungan, tahun 2000 an melalui program perlindungan sosial, pendekatan sektoral yang diperluas, desentralisasi dan pengentasan kemiskinan, tahun 2010 an yang lagi ramai sekarang adalah Program Dana Desa. Dari sekian banyak program dan kebijakan di atas nampaknya belum juga mengentaskan masyarakat desa dari kemiskinan. Yang sangat apriori dengan program pedesaan di Indonesia adalah Geertz yang berpendapat bahwa upaya apapun yang dilakukan tidak akan berhasil. Penyebabnya antara lain seperti yang disebutkan oleh Scott bahwa persoalan yang berlaku pada masyarakat pedesaan adalah rasionalitas sosial yang lebih memtingkan kebersamaan ketimbang persaingan. Prinsip moral lebih dominan daripada rasionalitas ekonomi sehingga pendekatan ekonomi akan sulit "bekerja" pada masyarakat desa. Penetrasi dari luar, baik menyangkut aspek kelembagaan maupun teknologi malahan akan menimbulkan resistensi. Ketidakmampuan untuk menangkap kultur dan nilai-nilai masyarakat desa inilah yang membuat banyak kebijakan pembangunan pedesaan gagal diterapkan di lapangan. Disisi lain kebijakan pembangunan pedesaan selama ini selalu menempatkan petani, nelayan dalam posisi sub ordinat kebijakan sehingga dengan posisi tersebut mereka selalu kalah bersaing. Belum lagi diperparah dengan

produk di sektor pertanian mudah rusak sementara petani tidak memiliki sarana penyimpanan yang cukup sehingga mau tidak mau mereka harus menjual dengan harga yang relatif murah. Akibatnya manfaat kebijakan justru dinikmati oleh kelompok non petani, misalnya pedagang atau juga pemilik modal. Peran pemerintah yang diharapkan menjadi pengayom masyarakat tidak nampak justru yang terjadi terlalu banyak slogan yang tidak bisa diaplikasikan sampai ke lapangan mulai dari perencanaan yang tidak matang sampai pada pelaksanaan dan pengawasan yang tidak berjalan. Muncul jargon politik dengan adanya penyerahan bantuan oleh pejabat di tengah-tengah masyarakat namun hanya sampai disitu karena setelah itu tidak ada tindak lanjutnya lagi. Belum lagi diperparah dengan adanya pemborosan, penyalahgunaan wewenang terhadap program misalnya bantuan sosial yang justru banyak menjerumuskan pejabat ke meja hijau. Mungkin ada benarnya sinyalemen mending Prof. Sumitro Djoyphadikusumo yang menyatakan bahwa kebocoran di negeri ini mencapai 35 % dalam pelaksanaan program. Akankah pelaksanaan Anggaran Dana Desa dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat pedesaan\*\*\*

*Penulis Dosen Fakultas Ekonomi UNG, Direktur Pusat Kemitraan dan Pengembangan Kerjasama UNG, Direktur Kerjasama Utara-Utara.*